

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah merupakan suatu area yang mempunyai arti (*meaningful*), karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya, khususnya masalah yang menyangkut sosial ekonomi (wilayah bukan sekedar areal dengan batas-batas tertentu) (Muta'ali, 2011:2). Menurut (Murty, 2000) merupakan suatu area geografis, teritorial atau tempat yang dapat berwujud suatu negara, bagian, provinsi, distrik (kabupaten), dan dan perdesaan yang memiliki satu kesatuan ekonomi, politik sosial, administrasi, iklim hingga geografis, sesuai dengan tujuan pembangunan atau kajian.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka yang panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan (Nugroho dkk, 2004). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Pemerintah melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah”, mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing–masing berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah. Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, serta moneter dan fiskal. Kewenangan pembiayaan, yaitu daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber potensi ekonomi, serta sumber daya alam tanpa ada intervensi dari Pemerintah Pusat.

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dilihat dari sisi pengeluaran PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap

domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah. Dilihat dari sisi produksi PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada jangka waktu tertentu (setahun). PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi netto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah (BPS, 2013).

Ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto, tiap-tiap daerah memiliki tingkat pertumbuhan yang tidak sama atau bervariasi karena masing-masing daerah mempunyai perbedaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang berbeda pula. Apalagi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan kewenangan daerah untuk menggali potensi daerahnya semakin besar sehingga daerah dapat berkompetisi dalam melakukan pembangunan di daerahnya sehingga akan terjadi percepatan pembangunan di masing-masing daerah. Jadi dengan kebijakan otonomi ini diharapkan dapat menjadi solusi ampuh dalam mengatasi persoalan kesenjangan sektoral maupun kesenjangan regional. Namun dalam penerapannya, apabila kebijakan otonomi tidak hati-hati dan/atau “selfish”, justru akan mengancam dan menyebabkan kesenjangan/ ketimpangan ekonomi yang lebih parah. Tingkat pertumbuhan yang tidak sama antar daerah justru malah menyebabkan ketimpangan. Ketimpangan ini perlu diperhatikan karena keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan riil per kapita atau laju pertumbuhan output yang tinggi, tetapi yang harus dilihat apakah pembangunan selama ini relatif merata (M Kusumaningrum, 2006).

Menurut Williamson 1966, pada tingkat awal pembangunan terjadi ketimpangan pendapatan regional yang makin meningkat. Faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan antar daerah yang semakin besar, yaitu: konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam (SDA) antar daerah, perbedaan kondisi demografis antar daerah dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah. (Tambunan, 2001: 278-286)

Pada dasarnya proses perencanaan pembangunan yang dilakukan berjalan dua arah, yaitu dari atas ke bawah (*top-down*) dan dari bawah ke atas (*bottom-up*) (Kartasasmita, 1996: 336-337). Dari atas ke bawah berupa penetapan sasaran-sasaran makro dan sektoral serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan secara nasional. Dari bawah ke atas

berupa aspirasi daerah yang merencanakan pengembangan potensi daerah serta menampilkan keadaan yang nyata di lapangan.

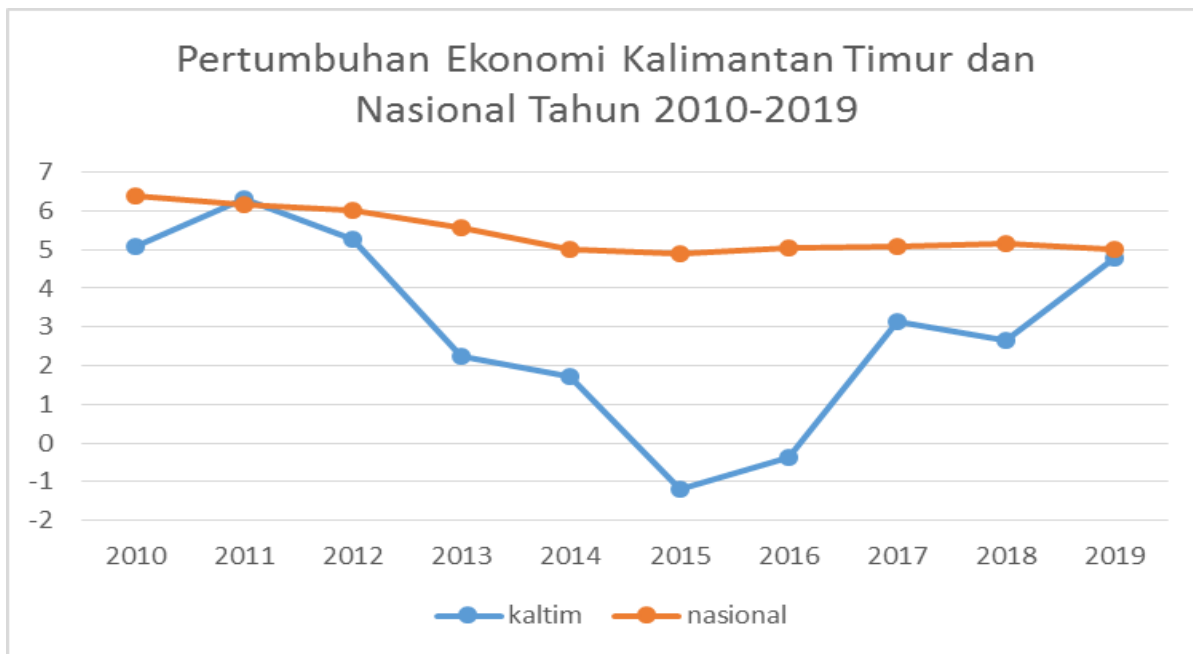
Sektor-sektor dalam kegiatan ekonomi memegang peranan penting dalam perencanaan karena data-data yang diperlukan dalam perencanaan berasal dari sektor-sektor ekonomi tersebut. Untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah perlu dikembangkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan yang cepat dalam pembentukan PDRB daerah tersebut. Setiap daerah masing-masing memiliki keunggulan yang tergantung pada kondisi wilayah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Perbedaan struktur perekonomian setiap daerah mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam merencanakan kebijakan perekonomian, sehingga setiap daerah harus mempunyai sektor unggulan yang sesuai dengan kemampuan daerahnya. (Vivi Erlinda Thio Putrid an Made Kembar Sri Budhi, 2020)

Sektor unggulan biasanya dilihat dari sektor basis yang dimiliki setiap kabupaten/kota dimana sektor tersebut mempunyai peranan ekspor sehingga tidak ada keterbatasan permintaan. Sektor basis dijadikan andalan untuk mengembangkan wilayah, sehingga dapat dipilih sektor unggulan dari setiap sektor yang ada di setiap kabupaten/kota tersebut. Menurut Kadariah (1985: 13), sektor-sektor dalam perekonomian mempunyai laju perkembangan yang berbeda-beda, dan hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ekonomi di suatu daerah. Struktur ekonomi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah dan karena struktur ekonomi terbentuk dari berbagai sektor ekonomi maka diperlukan adanya pergeseran sumber-sumber dari sektor ekonomi yang perkembangannya lambat ke sektor-sektor lainnya yang dapat berkembang lebih cepat.

Kalimantan Timur merupakan penyumbang hampir 50 persen perekonomian di Pulau Kalimantan. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pemerataan pembangunan yang ada di setiap kabupaten/kota. Terlihat dari masih banyak daerah tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur yang sulit untuk akses masuk ke daerah tersebut. Sulitnya akses masuk ke daerah dapat menyebabkan mobilitas barang dan jasa di daerah tersebut terhambat, sehingga akan membuat daerah tersebut semakin tertinggal. Salah satu fenomena tersebut merupakan ketimpangan wilayah antar daerah yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur (BAPEDDA kaltim, 2019).

Sepanjang 2019, Kalimantan Timur mencatatkan pertumbuhan ekonomi hingga 4,77 persen. Realisasi ini naik hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya di angka 2,67 persen. Mengutip sumber dari <https://kaltimtoday.co/pertumbuhan-ekonomi-kaltim-di-bawah-rata-rata-bank-indonesia-dorong-pemberdayaan-umkm-berbasis-digital/>

pertumbuhan ekonomi Kalimantan timur masih dibawah rata-rata nasional. Hal ini terjadi karena pusat pertumbuhan ekonomi masih di pulau Jawa. Untuk mengetahui lebih jelas perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Timur dengan nasional dapat dilihat dalam grafik tersebut.



Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur dan Nasional tahun 2010-2019

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Melihat grafik tersebut dapat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dalam rentang waktu 2010-2019. Menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan timur rata-rata masih dibawah pertumbuhan nasional. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan timur beberapa tahun cenderung turun hingga menunjukkan angka minus. Meskipun provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi yang besar pada sumber daya alamnya tetapi kenyataannya pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir rata-rata lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi tingkat nasional. Hal ini karena dampak dari penurunan harga pasar global tambang yang menurun dan pembatasan kebijakan import dari negara lain khususnya bahan tambang.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 10 kabupaten/kota dengan karakteristik sumber daya alam yang hampir sama yaitu pada sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian. Meskipun memiliki sumber daya alam yang hampir sama tetapi tidak memberikan pendapatan ekonomi yang berbeda. Selain itu persebaran jumlah penduduk

juga belum merata di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dari total penduduk Kalimantan Timur sebanyak 3,6 juta jiwa, hanya 26 ribu jiwa yang berada di Kabupaten Mahakam Ulu (0,70 persen). Perbedaan ini membuat tingkat pertumbuhan pembangunan di masing-masing daerah di Kalimantan Timur berbeda (BAPEDDA Kaltim, 2019). Berikut disajikan tabel PDRB provinsi Kalimantan timur

Tabel 1.1 Distribusi PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2019

Kabupaten /Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Paser	27130783.5 (7.08)	29383234.35 (7.14)	31160226.26 (6.97)	33281215.38 (7.09)	34782536.43 (7.40)
Kutai Barat	12795504.06 (3.34)	15165882.96 (3.9)	18045834.06 (4.27)	18558605.84 (4.21)	18906634.19 (4.04)
Kutai Kartanegara	121348880.4 (31.66)	123191976.3 (31.66)	129958164.7 (33.24)	130010300.7 (31.03)	128610623.4 (29.56)
Kutai Timur	59132111.79 (15.43)	69528391.24 (18.72)	77552439.58 (18.3)	80730971.5 (18.89)	83496498.62 (17.93)
Berau	14558923.85 (3.50)	17725234.38 (4.36)	20467252.87 (4.95)	22591473.81 (5.38)	24449675.47 (5.54)
Penajam Paser Utara	4599914.68 (1.20)	5452174.82 (1.26)	5771012.21 (1.28)	6201813.64 (1.34)	6373234.71 (1.43)
Mahakam Ulu	1145032.79 (0.30)	1226675.07 (0.28)	1350081.59 (0.3)	1359366.19 (0.3)	1426530.2 (0.34)
Balikpapan	57611960.58 (15.03)	60260220.85 (12.1)	63615143.51 (11.66)	65907250.46 (12.34)	68963949.05 (13.51)
Samarinda	30711190.61 (8.01)	35535425.82 (8.81)	35711573.43 (8.19)	37471852.56 (8.6)	39506305.28 (9.11)
Bontang	54258700.03 (14.16)	50234499.27 (11.77)	45623745.46 (10.83)	43012336.35 (10.8)	41622133.43 (11.14)
Kalimantan Timur	383293002.2	407435383.4	428877710.6	438532906.7	446029048.8

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur 2019

Lanjutab Tabel 1.1 Distribusi PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2019

Kabupaten /Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Paser	34472875.1 (7.61)	32755516.3 (7.3)	33137650.69 (7.44)	34356414.56 (7.61)	35690117.94 (7.37)
Kutai Barat	18623397.25 (4.23)	18468160.4 (4.31)	19139863.77 (4.37)	20103632.28 (4.45)	21224824.87 (4.41)
Kutai Kartanegara	119388779.6 (25.25)	117035579.5 (25.02)	118943986.8 (25.26)	121461425 (25.54)	126042289.9 (24.89)
Kutai Timur	84689772.11 (18.58)	83771694.41 (18.62)	86520249.92 (20.36)	88545266.36 (20.15)	95604475.04 (20.45)
Berau	25902530.38 (5.97)	25461369.82 (6.03)	26227291.85 (6.04)	26763906.6 (5.94)	28249551.21 (5.97)
Penajam Paser Utara	6382224.66 (1.48)	6351931.8 (1.5)	6506881.81 (1.44)	6587330.59 (1.4)	6753520.09 (1.39)
Mahakam Ulu	1473862.08 (0.39)	1524135.48 (0.42)	1589556.95 (0.4)	1675437.42 (0.4)	1766538.94 (0.42)
Balikpapan	69785744.75 (14.76)	73221462.06 (15.69)	76032079.12 (14.85)	79793795.43 (15.15)	83604887.63 (15.66)
Samarinda	39523547.41 (10.09)	39744722.94 (10.3)	41274972.29 (9.89)	43315910.7 (10.08)	45469879.52 (10.49)
Bontang	43437183.63 (11.64)	42835509.11 (10.81)	43073056.45 (9.97)	41306727.49 (9.3)	40406226.01 (8.94)
Kalimantan Timur	440676356.2	439003832.4	452741908.2	464823485.4	486977181.1

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur 2019

Dari tabel PDRB tersebut menunjukkan variasi PDRB dari kabupaten/kota di Kalimantan timur dan terdapat perbedaan yang cukup besar pada masing-masing wilayah. Kabupaten Kutai Kertanegara memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kalimantan timur sepanjang sepuluh tahun terakhir. Sedangkan daerah yang memiliki kontribusi paling rendah yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan melihat adanya perbedaan PDRB pada masing-masing kabupaten di provinsi Kalimantan Timur maka perlu adanya perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengacu pemerataan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah secara optimal. Perencanaan dapat diarahkan kepada pengembangan sektor-sektor dalam perekonomian daerah tersebut. Maka dari itu, perlunya mengetahui spesifikasi tiap sektor-sektor yang ada di suatu wilayah.

Mencermati ekonomi daerah Kalimantan timur sebagaimana data yang ada, maka analisis ekonomi wilayah perlu dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah masing-masing dengan melihat sektor-sektor ekonomi apa yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan plus atau minus dalam daerah tersebut, sektor-sektor apa yang termasuk unggul dalam wilayah tersebut, hal ini dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan dan menentukan prioritas untuk memajukan perekonomian Kalimantan timur. Sifat sektor unggulan yang tumbuh dominan, kompetitif dan surplus dapat dijadikan fokus untuk meningkatkan potensi sektor unggulan Kalimantan timur. Selain itu apakah masih terjadi ketimpangan wilayah yang terjadi pada daerah tersebut. Dengan penelitian ini merupakan langkah tambahan dalam upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah karena hal ini akan berdampak pada sektor ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap sektor ekonomi lainnya dan dapat berusaha meningkatkan pengembangannya daerah agar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul **“Analisis Ekonomi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 - 2019”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur?
- b. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor unggulan perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur?

- c. Bagaimana ketimpangan antar wilayah yang terjadi di provinsi Kalimantan Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Untuk menentukan sektor-sektor unggulan perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Untuk mengetahui ketimpangan antar wilayah yang terjadi di provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan ekonomi Kalimantan Timur.
- b. Sebagai bahan pustaka dan kajian guna menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang perencanaan pembangunan wilayah

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

- a. Ruang dan pewilayahan

Ruang dan pewilayahan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembahasan hal-hal yang menyangkut keberlangsungan suatu kehidupan dalam ilmu geografi. Gejala-gejala atau fenomena-fenomena terjadi silih berganti seiring berkembangnya waktu, hal-hal yang demikian yang merupakan bahan kajian dalam hal ini. Gejala atau fenomena tersebut yang nantinya akan memberikan pengaruh atau perubahan dalam suatu kehidupan, sehingga dalam konteks ruang dan pewilayahan gejala, fenomena, pengaruh dan perubahan merupakan hal yang pasti terjadi dan layak untuk dicermati. (Miftakul Janah, 2017).

Secara teoritis, dalam menelaah suatu persoalan keruangan, Geografi memiliki tiga pendekatan utama yaitu analisis spasial, analisis ekologis dan analisis kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah merupakan cara yang lebih tepat digunakan untuk menelaah fenomena geografis yang memiliki tingkat kerumitan tinggi karena banyaknya variabel pengaruh dan dalam lingkup multi dimensi (ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan) (Yunus, 2010).

Pendekatan kompleks wilayah merupakan perpaduan pendekatan keruangan dan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah lain karena ada perbedaan permintaan dan penawaran antarwilayah tersebut. Pada pendekatan ini analisa keruangan dan analisa ekologi atas wilayah dan atas interaksi antarwilayah tersebut tak hanya dipandang dari sisi penyebaran penggunaannya serta penyediaannya saja, tapi juga interaksinya dengan manusia pada wilayah tersebut (Yunus, 2010).

b. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2010). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan pendapatan dari berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga berlaku atau harga konstan. Sehingga perubahan dalam nilai pendapatan hanya disebabkan oleh suatu perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus diperbandingkan pendapatan nasional dari berbagai tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru tercipta apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar dari tahun-tahun berikutnya (Sukirno, 1985).

Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal ini juga sekaligus menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut (Tarigan, 2004).

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan bagian penting dalam analisis ekonomi wilayah dan perkotaan. Alasannya jelas karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi wilayah dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisis pertumbuhan ekonomi wilayah adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada pula daerah yang

tumbuh lambat. Disamping itu teori pertumbuhan ekonomi wilayah juga dapat menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah dan mengapa hal tersebut terjadi (Safrizal, 2012).

c. Pendapatan Regional

Pendapatan regional didefinisikan sebagai nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam suatu wilayah selama satu tahun (Sukirno, 1985:17). Sedangkan menurut Tarigan (2007:13), pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah analisis. Tingkat pendapatan regional dapat diukur dan total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan regional, diantaranya adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (BPS, 2020).

Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB, yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalan
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi

12. Real Estate
 13. Jasa Perusahaan
 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
 15. Jasa Pendidikan
 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
 17. Jasa lainnya
2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar.
 PDRN dapat diperoleh dengan cara mengurangi PDRB dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud di sini adalah nilai susut (aus) atau pengurangan nilai barang-barang modal (mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lainnya) karena barang modal tersebut dipakai dalam proses produksi. Jika nilai susut barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, hasilnya merupakan penyusutan keseluruhan (BPS, 2020).
 3. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor.
 Jika pajak tidak langsung netto dikeluarkan dari PDRN atas Dasar Harga Pasar, maka didapatkan Produk Regional Netto atas Dasar Biaya Faktor Produksi. Pajak tidak langsung meliputi pajak penjualan, bea ekspor, bea cukai, dan pajak lain-lain, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan (BPS, 2020)..
 4. Pendapatan regional
 Apabila pendapatan regional (*regional income*) dikurangi ; pajak pendapatan perusahaan (*corporate income taxes*), keuntungan yang tidak dibagikan (*undistributed profit*), iuran kesejahteraan sosial (*social security contribution*), ditambah transfer yang diterima oleh rumah tangga pemerintah, bunga neto atas utang pemerintah, sama dengan pendapatan perorangan (*personal income*). Apabila pendapatan perorangan dikurangi pajak pendapatan perorangan, pajak rumah tangga/PBB, dan transfer yang dibayarkan oleh rumah tangga akan sama dengan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) (BPS, 2020) .
 5. Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan
 Pendapatan regional yang didalamnya masih ada unsur inflasinya dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku. Sedangkan pendapatan regional dengan faktor inflasi yang sudah ditiadakan merupakan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun yang dijadikan patokan harga disebut tahun dasar untuk penentu harga konstan (Tarigan, 2004).

d. Teori Konsep Kutub Pertumbuhan dan Pusat Pertumbuhan (Growth Poles and Growth Centres).

Menurut Perroux dalam Tarigan (2004), Pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar daerah belakangnya. Secara geografis pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga mempunyai pusat daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada dikota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha–usaha tersebut (Tarigan, 2005). Menurut (Tarigan 2005) pusat pertumbuhan memiliki empat ciri yaitu:

1. Adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memilk nilai ekonomi, contohnya: kehidupan menjadi satu irama dengan berbagai komponen kehidupan kota dan menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan.
2. Ada efek berganda (multi effect), keberadaan sektor-sektor yang saling terkait mendukung akan menciptakan efek berganda, contohnya apabila ada satu sektor atas permintaan dari luar wilayah, produksinya akan meningkat karena ada keterkaitan membuat produksi sektor lain juga meningkat dan akan terjadi perputaran pertumbuhan, sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibandingkan dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut.
3. Adanya konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang paling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik (attractivenees) dari kota tersebut, contohnya orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan, jadi kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu, tenaga dan biaya, hal ini membuat kota tersebut menarik untuk dikunjungi karena volume transaksi yang meningkat akan mencipatakan economy of scale sehingga tercipta efisiensi lanjutan.
4. Bersifat mendorong daerah belakangnya, hal ini berarti bahwa antar kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis, contohnya kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai

kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri, otomatis kota itu akan berfungsi untuk mendorong belakangnya.

e. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan bagian penting dalam analisis ekonomi wilayah dan perkotaan. Pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi wilayah dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisis pertumbuhan ekonomi wilayah adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan adapula yang tumbuh lambat (Sjafrizal, 2012). Di samping itu, analisis pertumbuhan ekonomi wilayah ini juga dapat menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antardaerah dan mengapa hal tersebut terjadi.

Menurut Sjafrizal (2012), kemampuan suatu wilayah untuk tumbuh secara cepat sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang satu sama lainnya juga saling berkaitan. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut perlu diketahui secara rinci berikut sifat-sifatnya. Di samping itu, perlu diteliti seberapa besar pengaruh dan kontribusi dari masing-masing faktor tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu secara keseluruhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, menurut Sukirno (1994) dalam Prishardoyo (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Tanah dan kekayaan alam lain

Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi.

2. Jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah akan mendorong maupun menghambat pertumbuhan ekonomi. Akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika jumlah penduduk tidak sebanding dengan faktor-faktor produksi yang tersedia.

3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi, barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi.

4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sikap masyarakat akan menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

5. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan

Adam Smith telah menunjukkan bahwa spesialisasi dibatasi oleh luasnya pasar, dan spesialisasi yang terbatas membatasi pertumbuhan ekonomi.

f. Teori Basis Ekonomi

Kegiatan Basis (*Basic activities*) adalah kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (*Non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang jadi, luas lingkup produksi dan daerah pasar yang terutama bersifat lokal. Implisit didalam pembagian kegiatan- kegiatan ini terdapat hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi (Glasson, 1990).

Teori ekonomi basis (*Economic base theory*) mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk/jasa ke luar wilayah baik ke wilayah lain dalam negara itu maupun ke luar negeri. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Itulah sebabnya dikatakan basis, sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan yang bersifat endogenous artinya pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan sehingga kegiatan non basis sering disebut dengan pekerjaan (service) yaitu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri (Tarigan, 2005). Sektor basis ekonomi daerah dapat dianalisis dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ) dengan menggunakan variabel tenaga kerja atau PDRB suatu wilayah yang menghasilkan sektor basis, sektor non basis dan sektor unggulan.

g. Sektor Unggulan

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan

tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Rachbini, 2001).

Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan pada suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya (Widodo, 2006).

Sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyanto, 2000:146). Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah bersangkutan. Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu :

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki

kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

h. Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Strategi Pembangunan Wilayah

Menurut Arsyad (1999) permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi.

Perbedaan tingkat pembangunan yang di dasarkan atas potensi suatu daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin besar peranan potensi sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB daerah tersebut.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.

Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

i. Teori Tempat Sentral

Teori Tempat Sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hierarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (bahan baku dan industri). Teori ini diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik perkotaan maupun pedesaan. Beberapa daerah bisa menjadi penyedia jasa, sedangkan lainnya hanya sebagai pemukiman (Arsyad, 2002:117).

j. Teori *resources endowment*

Teori ini menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya alam tersebut. Dalam jangka pendek sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah merupakan suatu aset untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan.

Nilai dari suatu sumber daya merupakan nilai turunan dan permintaan terhadapnya merupakan permintaan turunan. Suatu sumber daya menjadi berharga jika dapat dimanfaatkan dalam bentuk-bentuk produksi. Tingkat dan distribusi pendapatan, pola perdagangan, dan struktur produksi merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat permintaan terhadap sumber daya wilayah.

Teori *resources endowment* secara implisit mengasumsikan bahwa dalam perkembangannya, sumber daya yang dimiliki suatu wilayah akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang berbeda bila terjadi perubahan permintaan. Penurunan relatif dari pentingnya bahan mentah pada nilai akhir suatu produk akan melemahkan kaitan antar sumber daya wilayah dan pembangunan ekonominya (Perloff and Wingo, 1961).

k. Teori Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Menurut (Syafriзал, 2008) ketimpangan pembangunan wilayah adalah perbedaan distribusi pembangunan ekonomi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan ekonomi wilayah. Disparitas atau ketimpangan wilayah adalah salah satu masalah yang pasti muncul dalam pembangunan wilayah. Ketidaksetaraan menjadi signifikan ketika wilayah dalam suatu negara terjadi pada berbagai potensi sumber daya alam, lokasi geografis, kualitas sumber daya manusia dan hubungan etnis atau politik. Salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan di wilayah ini adalah untuk mengatur pembangunan. Tapi pembangunan belum tentu untuk mengurangi ketimpangan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan konsep pemerataan pembangunan di Indonesia. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pengangguran.

Menurut (Syafriзал, 2008) ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat

pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan daerah ini yang pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju (*developregion*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Adapun penyebab–penyebab ketimpangan pembangunan ketimpangan antar wilayah menurut (Syafrizal, 2012) yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih rendah.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor lainnya yang juga mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah bila mana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah. Kurangnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

3. Ekonomi Konsentrasi Kegiatan Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena adanya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

4. Alokasi Dana Pembangunan Antarwilayah

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi jika sebaliknya di mana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi daerah, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan perkapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut.

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Haris (2012) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penentuan sektor/subsektor Unggulan dan Kaitannya Dengan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara. Hasil analisis menggunakan gabungan analisis *Location Quotient*, analisis *Shift Share*, terdapat 7 subsektor unggulan yaitu subsektor kehutanan, subsektor listrik, subsektor perdagangan, subsektor angkutan jalan raya, subsektor industri makanan dan minuman, subsektor perkebunan, subsektor perbankan. 6 subsektor sudah masuk RPJMD Lampung Utara tahun 2010-2014 dan 1 subsektor unggulan lainnya tidak masuk RPJMD.

Latif widiyanti (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perkembangan Ekonomi Wilayah Kota Surakarta Tahun 2005-2010” yang bertujuan untuk mengkaji pola pertumbuhan ekonomi kecamatan-kecamatan di Kota Surakarta tahun 2005-2010 dan mengkaji peranan sektor unggulan Kota Surakarta Terhadap Perekonomian Jawa Tengah. Menggunakan metode analisis data sekunder dengan alat analisis yaitu pertumbuhan ekonomi, tipologi klassen, dan LQ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ekonomi kecamatan di Surakarta hampir sama dengan pola pertumbuhan kota Surakarta itu sendiri. Sektor paling berkontribusi besar yaitu sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor industri, dan sektor bangunan. Enam dari sembilan sektor merupakan sektor basis, yaitu sektor listrik, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor pengangkutan, sektor keuangan, dan sektor jasa. Artinya pendapatan sektor basis lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata sektor yang sama di kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Prihatini (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Ekonomi wilayah Kabupaten di Eks-Karesidenan Surakarta (Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) Tahun 2010-2014”, yang bertujuan untuk Menganalisis kontribusi sektor perekonomian pada masing-masing kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2010-2014 dan menganalisis sektor unggulan pada masing-masing kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2010-2014. Menggunakan metode analisis data sekunder dengan alat analisis yaitu LQ dan Shift Share. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sektor pertanian unggul di kabupaten Boyolali dan Wonogiri. Pertambangan unggul di Boyolali, Wonogiri, Sragen, Klaten. Industri unggul di Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten. Listrik air bersih unggul di Karanganyar, Bangunan unggul di Boyolali, Sukoharjo, Sragen, dan Klaten. Perdagangan, hotel unggul di Sukoharjo, Sragen, dan Wonogiri. Pengangkutan dan Komunikasi unggul di Sukoharjo, Wonogiri, dan Klaten. Keuangan, jasa perusahaan, jasa-jasa unggul di Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten.

Arif Winata (2018), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Keruangan Perkembangan Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2014”, yang bertujuan untuk menjelaskan variasi keruangan sektor ekonomi serta sektor unggulan. Menggunakan metode analisis data sekunder dengan alat analisis yaitu LQ. Hasil penelitian menunjukkan sektor basis yaitu pertanian hampir rata-rata di semua kecamatan, industri ada di Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Bandongan. Listrik ada di Ngablak, Grabak, Pakis, Tegalrejo, Secang, Kaliangkrik, Kajoran. Bangunan ada

di Nluwar, Salam, Srumbung. Perdagangan ada di Salam dan Secang. Komunikasi ada di Mungkid dan sektor jasa-jasa di semua kecamatan ada.

Asmar Falah Dhani (2018), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Salatiga Tahun 2014-2016”, yang bertujuan untuk mengetahui potensi ekonomi dan pola struktur pada masing-masing kecamatan di Kota Salatiga tahun 2014-2016. Menggunakan metode analisis data sekunder dengan alat analisis yaitu LQ dan Tipologi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan Kecamatan Argomulyo terdapat 5 sektor usaha potensial, kecamatan Tingkir terdapat 4 sektor usaha potensial, kecamatan Sidomukti terdapat 4 sektor usaha potensial, dan kecamatan Sidorejo terdapat 4 sektor usaha potensial. Kecamatan yang memiliki tipe II adalah kecamatan Sidomukti, tipe III yakni kecamatan Tingkir dan Sidorejo, dan tipe IV adalah kecamatan Argomulyo.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah perbedaan metode analisis, penelitian ini menggunakan kolaborasi metode analisis ekonomi pembangunan (pertumbuhan ekonomi, Indeks Williamson; ketimpangan wilayah, Tipologi Klassen; percepatan pembangunan dan Location Question: sektor Potesial), maka dapat diketahui pola tren pertumbuhan ekonomi, sektor pertumbuhan dan unggulan ekonomi, dan tingkat ketimpangan wilayah yang terjadi. Serta menggunakan periode kurun waktu lebih panjang dibanding penelitian sebelumnya.

Tabel 1.2 penelitian sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil
Zulfi Haris (2012)	Analisis Penentuan sektor/subsector Unggulan dan Kaitanya Dengan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara.	- Identifikasi Sektor/Sub sektor Unggulan -Bagaimana dukungan pemerintah daerah kabupaten lampung utara terhadap sektor/sub sektor unggulan melalui program prioritas dalam RPJMD dan alokasi anggaran.	Analisis data sekunder	Terdapat 7 subsektor unggulan yaitu subsektor kehutanan, subsektor listrik, subsektor perdagangan, subsektor angkutan jalan raya, subsektor industri makanan dan minuman, subsektor perkebunan, subsektor perbankan. enam subsektor sudah masuk RPJMD Lampung Utara tahun 2010-2014 dan 1 subsektor unggulan lainnya tidak masuk RPJMD.

Lanjutan Tabel 1.2 penelitian sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil
Latif widiyanti, (2015)	Analisis Perkembangan Ekonomi Wilayah Kota Surakarta Tahun 2005-2010	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji pola pertumbuhan ekonomi kecamatan-kecamatan di Kota Surakarta tahun 2005-2010 - Mengkaji peranan sektor unggulan Kota Surakarta Terhadap Perekonomian Jawa Tengah 	Analisis Data Sekunder (Pertumbuhan Ekonomi, Tipology klassen, LQ)	Pola pertumbuhan ekonomi kecamatan di Surakarta hampir sama dengan pola pertumbuhan kota Surakarta itu sendiri. Sektor paling berkontribusi besar yaitu sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor industri, dan sektor bangunan. Enam dari sembilan sektor merupakan sektor basis, yaitu sektor listrik, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor pengangkutan, sektor keuangan, dan sektor jasa. Artinya pendapatan sektor basis lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata sektor yang sama di kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Setiyo Prihatini (2017)	Analisis Ekonomi wilayah Kabupaten di Eks-Karesidenan Surakarta (Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri,	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis kontribusi sektor perekonomian pada masing-masing kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2010-2014. - Menganalisis sektor unggulan pada masing-masing kabupaten 	Analisis Data Sekunder (LQ dan Shift Share)	Sektor pertanian unggul dikabupaten Boyolali dan Wonogiri. Pertambangan unggul di Boyolali, Wonogiri, Sragen, Klaten. Industri unggul di Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten. Istrik air bersih unggul di Karanganyar, Bangunan unggul di Boyolali, Sukoharjo, Sragen, dan Klaten. Perdagangan, hotel unggul di Sukoharjo, Sragen,

Lanjutan Tabel 1.2 penelitian sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil
	Sragen, dan Klaten) Tahun 2010-2014	Eks-Karesidenan SurakartaTahun 2010-2014.	Analisis Data Sekunder (LQ dan Shift Share)	dan Wonogiri. Pengangkutan dan Komunikasi unggul di Sukoharjo, Wonogiri, dan Klaten. Keuangan, jasa perusahaan, jasa-jasa unggul di Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten.
Arif Winata (2018)	Analisis Keruangan Perkembangan Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2014	menjelaskan variasi keruangan sektor ekonomi serta sektor unggulan	Analisis Data Sekunder (LQ)	sektor basis yaitu pertanian hamper rata-rata di semua kecamatan, industri ada di Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Bandongan. Listrik ada di Ngablak, Grabak, Pakis, Tegalrejo, Secang, Kaliangkrik, Kajoran. Bangunan ada di Nluwar, Salam, Srumbung. Perdagangan ada di Salam dan Secang. Komunikasi ada di Mungkid dan sektor jasa-jasa di semua kecamatan ada.

Lanjutan Tabel 1.2 penelitian sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil
Asmar Falah Dhani (2018)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Salatiga Tahun 2014-2016	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui potensi ekonomi pada masing-masing kecamatan di Kota Salatiga tahun 2014-2016 - Mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga tahun 2014-2016 	Analisis Data Sekunder (LQ dan Tipologi Daerah)	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Argomulyo terdapat 5 sektor usaha potensial, kecamatan Tingkir terdapat 4 sektor usaha potensial, kecamatan Sidomukti terdapat 4 sektor usaha potensial, dan kecamatan Sidorejo terdapat 4 sektor usaha potensial. - Kecamatan yang memiliki tipe II adalah kecamatan Sidomukti, tipe III yakni kecamatan Tingkir dan Sidorejo, dan tipe IV adalah kecamatan Argomulyo.
Rivan Deny Pratama (2021)	Analisis Ekonomi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 – 2019	<p>mengkaji pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur,</p> <p>menentukan sektor-sektor unggulan perekonomian, serta mengetahui ketimpangan wilayah yang terjadi.</p>	Analisis Data Sekunder (Pertumbuhan Ekonomi, Tipology klassen, LQ, dan indeks Williamson)	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur sebagian besar mengalami kecenderungan penurunan dari tahun 2011 sampai 2016. Hal ini terjadi di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Timur. - Sektor unggulan di Kalimantan Timur memiliki variasi yang berbeda-beda, Kota Balikpapan

Lanjutan Tabel 1.2 penelitian sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil
				<p>memiliki 5 sektor unggulan. Kota Bontang memiliki 1 sektor unggulan. Kabupaten Kutai Barat memiliki 5 sektor unggulan. Kabupaten Kutai Timur memiliki 1 sektor unggulan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 1 sektor unggulan. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki 1 sektor unggulan. Kabupaten Paser memiliki 1 sektor unggulan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 2 sektor unggulan. Kota Samarinda memiliki 6 sektor unggulan.</p> <p>- Dalam pembangunannya selama tahun 2011-2019 provinsi Kalimantan Timur mampu menurunkan angka indeks ketimpangan wilayah sampai nilai terakhir 0,48. Beberapa wilayah masih memiliki nilai indeks ketimpangan tinggi seperti Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.</p>

Sumber: Peneliti, 2021

1.6 Kerangka Penelitian

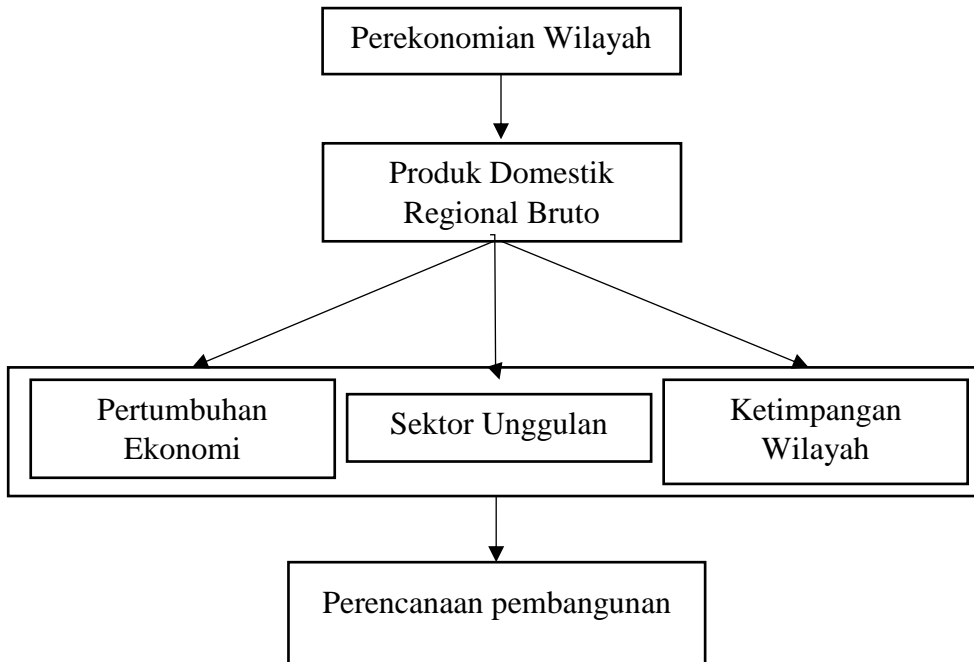
Suatu daerah memiliki potensi ekonomi wilayah yang dapat terlihat dari besaran PDRB yang dihasilkan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya, serta menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara total maupun per sektor. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu strategi pembangunan diupayakan untuk menggali potensi yang ada, agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

Namun jika dilihat dari potensi masing-masing daerah akan memiliki perbedaan, hal ini terjadi disebabkan kepemilikan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dari masing-masing kabupaten/ kota berbeda-beda. Baik potensi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) maupun potensi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah, sedangkan keunggulan kompetitif adalah kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya dari luar daerah/ luar negeri/ pasar global (Tarigan, 2005),

Sektor ekonomi unggulan akan di korelasikan dengan kondisi daerah atau variasi keruangan sehingga dapat diketahui oleh semua pihak sebab terjadinya perbedaan sektor ekonomi unggulan di masing-masing Kabupaten dengan menganalisis menggunakan kondisi geografis daerah tersebut. Dengan menggunakan kolaborasi metode analisis ekonomi pembangunan (pertumbuhan ekonomi, *Indeks Williamson*; ketimpangan wilayah, *Tipologi Klassen*; percepatan pembangunan dan *Location Question*: sektor Potesial), maka dapat diketahui pola pertumbuhan ekonomi, sektor pertumbuhan dan unggulan ekonomi

Sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. karena akan memberikan keuntungan kompetitif atau komparatif yang kemudian akan mendorong pengembangan ekspor barang maupun jasa. Kebijakan strategi pembangunan harus diarahkan kepada kebijakan yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan

lapangan pekerjaan. Sektor unggulan yang diperoleh melalui analisis bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang. Lebih jelas maka dapat disusun suatu Gambar 1.2 skema sebagai berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Penelitian

Sumber: Penulis, 2020

1.7 Batasan Operasional

- a. Sektor Unggulan (*leading sector*) adalah sektor yang memiliki peranan (*share*) relatif besar dibanding sektor-sektor lainnya terhadap ekonomi wilayah (Tambunan, 2001).
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga konstan (Tarigan, 2007).
- c. Sektor Ekonomi adalah lapangan usaha yang terdapat pada PDRB, (Tarigan, 2007).
- d. Wilayah adalah unit unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana komponen-komponennya memiliki arti dalam pendiskripsian perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdayasumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis. (Ernan Rustiadi et al, 2010)
- e. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut (Tarigan, 2004)
- f. Sektor Basis adalah sektor yang mampu mengekspor barang-barang dan jasa-jasa keluar batas perekonomian masyarakat bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada lingkup yang lebih luas. Sektor basis bila nilai $LQ > 1$ maka di sebut sektor basis
- g. Sektor Non Basis adalah sektor yang hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan daerah itu sendiri dan sektor ini tidak mengekspor barang diluar daerah. Bila nilai $LQ < 1$ maka disebut sektor non basis
- h. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2006).
- i. Ketimpangan pembangunan wilayah adalah perbedaan distribusi pembangunan ekonomi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan ekonomi wilayah (Syafrizal, 2008)